



Nilai Sewa Aset Dinilai Tidak Wajar

PONTIANAK — Aset bermasalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diminta terus diusut hingga benar-benar ditemukan dan dikembalikan fungsinya. DPRD Kalbar juga diminta saling bekerja sama guna mencari, menelusuri, menuntaskan dan mengembalikan aset milik daerah hilang, tak tepat sasaran, tak sesuai peruntukan dan terkesan sengaja melanggar aturan.

“Kemarin, kita ribut dengan persoalan aset. Harusnya memang Pansus aset dibentuk secara bersama-

sama untuk sama-sama mendata aset milik Pemprov Kalbar. Jangan sampai hilang, tak tahu rimbanya,” ungkap Ireng Maulana, Pengamat Politik lulusan IOWA Amerika, baru-baru ini di Pontianak

Menurut Ireng, persoalan aset dengan saling kerjasama membentuk tim pansus aset bersama bertujuan memang mendata dan mengembalikan aset daerah sesuai peruntukan. Pansus aset bersama merupakan jalan keluarnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Nilai Sewa Aset Dinilai Tidak Wajar

Sambungan dari halaman 9

“Ini hanya usul saja, supaya tidak ada dusta ketika mengusut aset milik negara (Pemprov) Kalbar,” icap dia.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah memang menyambut titikad Pemprov Kalbar mendata aset-aset Kalbar ditengarai masih bermasalah dan terus menjadi laporan BPK. Ketua Gerindra Kalbar ini bahkan mengusulkan kepada anggota DPRD Kalbar segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Aset untuk menelusuri masalah aset, meneliti harga kewajaran aset dan mendata aset hilang.

“Apapun terkait masalah aset tidak beras, kami dukung. Yang pastinya datanya harus riil,” ujarnya.

Usulan pembentukan tim aset, diamini Komisi II

DPRD Kalbar, Lutfi A. Hadi menyebutkan bahwa terpenting selagi aset masih milik Pemprov Kalbar dan masih ada dengan orangnya, sebaiknya diambil kembali saja. Sementara aset berupa penempatan HGB (Hak Guna Bangunan) lahan milik pemprov wajib dikaji kembali, jika memang tidak dalam kewajaran. “Kami DPRD Kalbar siap bekerjasama dengan Pemprov mendata aset-aset milik Pemprov Kalbar,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji sempat melontarkan protesnya dan meminta persetujuan DPRD Kalbar untuk membahas bersama-sama masalah aset Pemprov Kalbar. Sebagaimana pernah diungkapkan bahwa ada aset disewakan, tetapi harganya tidak standar.

“Sangat kecil, tidak ideal dengan harga zaman sekarang. Belum lagi aset-aset lain. Akan kami telusuri dan data kembali. Di mana aset hilang, akan kami data dan cari. Sementara aset-aset dikuasai tetapi tak sesuai aturan akan kita ambil alih secepatnya,” ujarnya.

Midji sempat memberikan contoh ada aset tanah disewakan pemprov, tetapi tarifnya tidak wajar. Pasalnya lahan tersebut terletak di pusat perkotaan tetapi hanya dibayar murah. Ia lantas mencontohkan bagaimana tarif ditetapkan untuk HGB (Hak Guna Bangunan) pada salah satu kawasan strategis di Daerah Palapa, Kota Pontianak ternyata harganya sangat kecil.

Padahal rata-rata rumah yang dibuat pemakai HGB berkisar antara Rp5 sampai

Rp6 miliar.

“Tetapi tanah disewakan selama 20 tahun hanya sekitar Rp20 juta saja. Aneh juga. Sebab sewaktu saya di Kota Pontianak (wali kota), Ruko di Pasar Flamboyan saja yang hanya 64 meter per ruko, dibayarkan Rp240 juta untuk beberapa puluh tahun. Nah nilai harga sewa HGB di kawasan strategis seperti Palapa kok kecil. Tidak ideal itu namanya. Tarifnya terlalu kecil untuk pemasukan daerah,” ujarnya.

Idealnya, kata Midji, aset milik Pemprov yang disewakan untuk satu tahun dihargai sekitar 2-5 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) disana. “Namun yang sekarang hanya dihargai 2 persen saja dari NJOP, tetapi waktunya untuk 20 tahun. Jelas merugikan daerah (Kalbar),” ucapnya. (den)